SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 01.2/ORT.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI D I LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
b. bahwa untuk melaksanaan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Kepulauan Sula, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-

Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 908 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 01.2/ORT.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2026, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
   a) Tim Manajemen Perubahan;
   b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
   c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
   d) Tim Penataan Tata Laksana;
   e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
   f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
   g) Tim Pengawasan;
   h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 01.2/ORT.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 05 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MUKHLIS FAKIM, S.IP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 01.2/ORT.01.4-Kpt/02/8205/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	**PENGARAH**			
1.	Risman Buamona, S.E.	Ketua KPU	Ketua Pengarah	➢ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; ➢ Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja ber-jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2.	Samsul Bahri Teapon, S.Pd.	Anggota KPU/ Kadiv Hukum dan Pengawasan	Anggota Pengarah	
3.	Fahrul, Pora, S.H.	Anggota KPU/ Kadiv Rendatin	Anggota Pengarah	
4.	Hamida Umalekhoa, S.Pd. M.I.Kom	Anggota KPU/ Kadiv Teknis Penyelenggaraan	Anggota Pengarah	
5.	Andi Umaternate, S.Pd, M.Pd.	Anggota KPU/ Kadiv SDM dan Parmas	Anggota Pengarah	
PELAKSANA				
1.	Abdullah Basri, S.E.	Sekretaris KPU	Ketua Pelaksana	Memimpin, mengkoordinasikan dan mengevaluasi implementasi Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Sula.
a.	**TIM MANAJEMEN PERUBAHAN**			
1.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	➢ Menyusun strategi manajemen perubahan dan melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Sula; ➢ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Assesor	
4.	Hasnawati. S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Assesor	
5.	Muh. Saleh Sangadji, S.AP	Dokumentalis Hukum Pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
6.	Irwan, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada	Anggota	

		Subbagian Teknis dan Hukum		
7.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Muh Erwin Gutawa S, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Munawir Silayar, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
b.	**TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN**			
1.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	➢ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepulauan Sula; ➢ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab.Kepulauan Sula.
2.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Assesor	
3.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Assesor	
4.	Hasnawati. S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Assesor	
5.	Widi Santoso, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
6.	Muh. Saleh Sangadji, S.AP	Dokumentalis Hukum Pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
8.	Risman Kana, S.T	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
c.	**TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN**			
1.	Nurjana Sanaba, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Assesor	
3.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Assesor	

4.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Assesor	
5.	Muh Erwin Gutawa S, S.Kom	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Hayatudin pauwah	Administrasi Kepegawaian pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
7.	Juniani Tauda	Pengadministrasi Keuangan Pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
8.	Afendy Buamonabot	Pengelola Dta dan Informasi pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Yanto Sangadji	Operator Layanan Operasional Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Nurmala Silayar	Pengadministrasi Perkantoran Pada Subbagian Keuanga, Umum dan Logistik	Anggota	
d.	**TIM PENATAAN TATALAKSANA**			
1.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	➢ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business; ➢ Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-
2.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Asessor	
3.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Asessor	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Asessor	
5.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Hider Hi Abdulah	Pengelola Data dan Informasi	Anggota	
7.	Idris Abdullah	Teknis Administrasi Lainnya Pada Subbagian Keuangan, Umum dan	Anggota	

		Logistik		
8.	Jauhar Faudu	Pengadministrasi Umum pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
9.	Diana M. Sapsuha	Penata Layanan Operasional pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Saddam Umsohy	Operator Layanan Operasional	Anggota	
e. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	➢ Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; ➢ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; ➢ Melaksanakan penerapan penilaian kinerja individu; ➢ Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Asessor	
3.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Asessor	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Asessor	
5.	M.KARDI	Operator Layanan Operasional pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
6	Munawir Silayar, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
7.	Hayatudin pauwah	Administrasi Kepegawaian pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
8	Sahril Umanailo	Pengadmistrasi Perkantoran Pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
9.	Visfa Sarapita Dewi S	Operator Layanan Operasional pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
10.	Nurlaila Buamona	Penata Layanan Operasional pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
f. TIM PENGAWASAN				
1.	Mukhlis Takim, S.IP	Plt.Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	➢ Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian

		Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.		Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum RI. ➢ Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting.
2.	Zulhaidir Lutfi Kadir, S.Sos	Kasubbag Parmas dan SDM	Asessor	
3.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Asessor	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Asessor	
5.	Irwan, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Widi Santoso, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
7.	Muhammad Saleh Sangadji, S.AP	Dokumentalis Hukum pad subbagian teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota	
8.	Visfa Sarapita Dewi S	Operator Layanan Operasional pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
g. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator merangkap Anggota	➢ Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. ➢ Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Sula
2.	Zulhaidir Lutfi kadir, S. Sos	Kasubbag Parmas dan SDM	Asessor	
3.	Mukhlis Takim, S.IP	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Asessor	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Asessor	
5.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
6.	Idris Abdullah	Teknis Administrasi Lainnya Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Arfiah Umawaitina	Operator layanan Operasional pada Subbagian Perencanaan, data	Anggota	

		dan Informasi		
8.	Munanjar Syah Munir	Operator layanan Operasional pada Subbagian Perencanaan, data dan Informasi	Anggota	
h. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	➢ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; ➢ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Asessor	
3.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Asessor	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Asessor	
5.	Hayatudin pauwah	Administrasi Kepegawaian pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
6.	Munawir Silayar, S.E	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama pada Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
7.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
8.	Yanto Sangadji	Operator Layanan Operasional Pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
i. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Zulhaidir Lutfi Kadir. S.Sos.	Kasubbag Parmas dan SDM	Koordinator perubahan di Parmas dan SDM	➢ Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; ➢ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kegiatan di program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan ➢ Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan
2.	Hasnawati, S.IP	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Koordinator perubahan di Subbagian Perencanaan, Data & Informasi	
3.	Mukhlis Takim, S.IP.	Plt.Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	Koordinator perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum.	
4.	Nurjana Sanaba, S.IP	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Koordinator perubahan di Subbagian Keuangan, Umum &	

			Logistik	dengan Reform
5.	Muhammad Saleh Sangadji, S.AP	Dokumentalis Hukum pad subbagian teknis Penyelenggaraan pemilu dan Hukum	Anggota	
6.	Irwan, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
7.	Widi Santoso, S.H	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
8.	Muh. Ramadan Umabaihi, S.T	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota	
9.	Juniani Tauda	Pengadministrasi Keuangan Pada Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota	
10.	Visfa Sarapita Dewi S	Operator Layanan Operasional pada Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 05 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Ttd.

RISMAN BUAMONA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA
SEKRETARIAT

MUKHLIS TAKIM, S.IP